

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku :

- Abdurrahman, 2001, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Effendi, Bachtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2002, *Sengketa-Sengketa Tanah Serta Penanggunaannya*, Makalah Seminar: Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djamban, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djamban, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 2005, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta.
- Hutagulung, Aris S, 2005, *Tebaran Pemikir Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta.
- Ismail, Nurhasan, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
- Jauhari, Heri, 2008, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Artikel, Resensi, Makalah, Skripsi, Tesis*, CV. Mustika Setia, Bandung.

- Kolopaking Anita Dewi Anggraeni, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margareth Pustaka, Jakarta.
- Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017, *Buku Panduan*, Yogyakarta.
- Bahua, Mohamad Ikbil, 2016, *Kinerja Penyuluh Pertanian*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muliawan, Jarot Widya, 2019, *Cara Mudah Pahami Sertifikasi Tanah Aset Desa Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition*, Inteligensia Media, Malang.
- Muttaqien, Andi, Nurhanudin Ahmad, dan Wahyu Wagiman, 2012, *Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarian Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-Pasal Kriminalisasi Oleh Mahkamah Konstitusi*, Elsam-Sawit Watch-Pilnet, Jakarta Selatan.
- Parangin Efendi, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Parlindungan, A.P, 1991, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuatan Akta Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2015, *Perolehan Hak Atas tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sari, Irma Devita Purnama, 2010, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa PT. Mizan Pustaka, Bandung.

- Sembiring Jimmy Joses, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media*, Jakarta.
- Simarmata, Rikardo, 2009, *Gejala Informalitas Pada Tanah Garapan*, Law Reform.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- Suhendar, Endang & Winarni, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga, Bandung.
- Suhendar, Endang, 1994, *Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat*, Akatiga, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, M, *Operasional Penelitian Hukum*, 2007, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Tehupeiory, Aartje, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
- Tjondronegoro, Soediono MP dan Gunawan Wiradi (Peny), Gunawan, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Gramedia, Jakarta.
- Wagiman, Wahyu, Andi Muttaqien, Nurhanudin Ahmad, 2012, *Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarian Wet: Dasar dan Alasan*

Pembatalan Pasal-Pasal Kriminalisasi Oleh Mahkamah Konstitusi, Elsam-Sawit Watch-Pilnet, Jakarta Selatan.

Wargakususma, Hasan, 2001, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prenhalindo, Jakarta.

Winarni, Endang Suhendar, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga, Bandung.

Zaenal, Asdikin, Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Jurnal/Tesis:

Haryanto, Totok Dwinur, "Model Penatagunaan Tanah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960," *Wacana Hukum*, Vol VIII No. 2 Oktober 2009.

HL, H. Wahbah HL, "Tumpang Tindih antara Tanah Kuasa Pertambangan dengan Hak Atas Tanah", *Tesis*, Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.

Linasari, Tami Linasari, "Implementasi Peraturan Bersama Tentang Tata cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan", *Tesis*, Program Studi Pascarsarjana (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.

Pardosi, Monika Febriani, "Tumpang Tindih Hak Penguasaan Tanah dan Upaya Penanggulangannya Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah", *Tesis*, Program Studi Pascarsarjana (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.

Putra, Adhie Musjhranie Swastya. Budiono, A. Rachmad. Istislam. "Pendudukan Tanah Garapan Kelompok Tani Anak Negeri Terkait Dengan Upaya Peningkatan Hak Atas Tanah Garapan (Studi Kasus Penguasaan Tanah Oleh PT. Kalimantan Plywood Industries)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.

Reza, Muhammad, Melinda Noer, Yonariza, Asmawi, "Hubungan Ikatan Anggota Kelompok Tani dengan Partisipasinya pada Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Penyuluhan*, Maret 2019 Vol.15 No.1.

Simarmata, Rikardo, "Indonesia Law dan Reality in the Delta: a sosio-legal inquiry into laws, local bueraucrats and natural resources

management in the Mahamakam Delta, East Kalimantan,”
Disertasis, Program Studi Doktor (Ph.D) Fakultas hukum, Universitiet
Leiden, Belanda, 2012.

Simarmata, Simarmata, Legal Complecity In Natural Resource Management
In The Frontier Mahakam Delta Of East Kalimantan, Indonesia,
Journal Of Legal Pluralism 2010-nr.62.

Simarmata, Rikardo, “Kedudukan Hukum dan Peluang Surat Keterangan
Tanah Adat,” *Hasil Penelitian*, The Partnership For Governance,
Reform, 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 308 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5613.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Satuan
Rumah Susun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3696.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional
Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Penetapan Hak Guna Usaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 965.

4. Internet

Putri Hadrian, "Berlarut, Konflik lahan Masyarakat Dengan Perusahaan Sawit diKubu Raya", <http://www.mongabay.co.id/2017/05/30/berlarut-konflik-lahan-masyarakat-dengan-perusahaan-sawitdikuburaya/>, diakses tanggal 20 Juni 2018.

Sovia.Hasanah, "Surat.Kepemilikan.Tanah.Atau.Surat.Keterangan.Riwayat.Tanah", <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt591d53cb37b54/surat-kepemilikan-tanah-atau-surat-keterangan-riwayat-tanah> diakses tanggal 17 Oktober 2018.

Fathan Muhammad Taufiq, "PP Nomor 18 Tahun 2016 Tidak Mengubah Tugas dan Fungsi Penyuluh", <https://www.kompasiana.com/masfathan66/5816df85d192733b44dc372f/pp-nomor-18tahun2016tidakmengubah-tugas-dan-fungsi-penyuluh-pertanian>, diakses tanggal 16 Juni 2019.